BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Sejarah dan Perkembangan Bank Indonesia Bandung

Sebagai bank sentral, keberadaan Bank Indonesia memiliki peranan yang sangat penting. Fungsi dan perannya tersebut terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu, baik sejak tahun kelahirannya 1953 maupun sejak didirikannya sebagai bank umum dengan nama De Javasche Bank di tahun 1828. Secara sederhana dapat diungkapkan bahwa keberadaan kantor cabang Bank Indonesia merupakan sebuah perpanjangan tangan dari kantor pusatnya yang berada di Jakarta. Dengan demikian, fungsi dan peranannya pada dasarnya identik dengan fungsi peran kantor pusatnya. Satu hal yang menarik sekaligus membedakan keberadaan De Javasche Bank cabang Bandung adalah pertimbangan pembukaannya di awal abad ke-20. Kekhawatiran pihak militer Hindia Belanda akibat meletusnya perang Boer, menyebabkan adanya pertimbangan untuk mendirikan tempat pelarian kekayaan ke pedalaman pulau jawa. Kota Bandung yang berjarak ± 150 km dari kota Batavia (sekarang Jakarta), dipandang sebagai tempat yang ideal untuk mewujudkan gagasan tersebut di atas. Selanjutnya, pada pertengahan tahun 1909, rencna pembukaan kantor cabanng De Javasche Bank di Bandung baru dapat diwujudkan, dengan catatan adanya kemungkinan kerugian operasional, yang kembali memperlihatkan adanya pertimbangan

non bisnis yang kuat melatar-belakangi pembukaan kantor cabang ini. Seperti yang telah ditulis diatas, bahwa terjadinya perang Boer (Boeren Oorlog) yang terjadi di Afrika Selatan telah menimbulkan gelombang kekhawatiran di kalangan militer Hindia Belanda. Negara Inggris yang kala itu merupakan negara super power, dengan seluruh kekuatan militernya, terutama armada lautnya, dipandang merupakan sebuah ancaman besar yang sewaktu-waktu dapat melakukan penyerangan ke seluruh koloni Belanda. Dengan pemahaman ekonomi kala itu yang umumnya menggunakan pandangan Markantilisme yaitu kemakmuran dan kekayaan suatu negara atau bangsa diukur dari seberapa banyak negara atau bangasa tersebut memiliki persediaan emas, maka menjadi tidak mengherankan apabila peperangan, aneksasi, kolonisasi atau sejenisnya pada masa itu sangat identik dengan upaya-upaya perebutan dan penumpukan kekayaan (emas) demi sebuah kejayaan dan kemakmuran suatu bangasa atau negara. Sejalan dengan pemahaman tersebut diatas, maka menjadi dapat dimengerti apabila suatu negara melakukan upaya-upaya perlindungan sedemikian rupa atas kekayaan (emas) nya, baik dikala perang ataupun damai.

Di wilayah kolonialisasi Belanda di Asia tenggara atau dulu lebih dikenal sebagai Hindia Belanda, upaya-upaya perlindungan atas kekayaan, khususnya akibat dari adanya perang Boer, juga dilakukan. Salah satu upaya tersebut adalah terjadinya sebuah kesepakatan antara presiden De Javasche Bank ke-10, J. Reijsenbach dengan pemerintah Hindia Belanda

pada permulaan abad ke-20 untuk mencari jalan keluar yang terbaik dan tercepat dalam rangka mengamankan kekayaan bank dari daerah pantai ke daerah pedalaman. Kesimpulan yang kemudian diambil adalah adanya keinginan untuk membangun kantor cabang De Javasche Bank di Bandung. Hal ini kemudian dilaporkan kepada dewan militer dengan suratnya No. 165 tanggal 7 Mei 1902 serta kepada pihak pemerintah dengan suratnya No. 420 tanggal 16 Juni 1902 yang berisi permohonan agar pemerintah menunjuk kota Bandung sebagai tempat didirikannya kantor cabang De Javasche Bank.

Rencana pendirian kantor cabang ini selanjutnya lebih disiapkan dengan adanya permintaan dari pihak De Javasche Bank kepada pemerintah agar dapat menyiapkan sebidang tanah hak milik disamping menanggung biaya-biaya pendirian lainnya seperti biaya transportasi biaya tenaga kerja dari Batavia dan biaya pengangkutan material yang perlu didatangkan dari luar Hindia Belanda. Permohonan ini disampaikan dengan pertimbangan bahwa kantor cabang yang akan didirikan ini belum pasti bisa mendatangkan keuntungan.

Menanggapi permohonan ini, melalui suratnya No 421 tanggal 4 Februari 1903, sekretaris pertama Gubernur Jendral mengharapkan adanya penegasan Dereksi untuk tidak keberatan menanggung biaya-biaya yang dimaksud setelah kantor cabang yang bersangkutan memperoleh keuntungan. Walaupun direksi De Javasche Bank telah menyanggupi permintaan tersebut, namun demikian rencana pendirian kantor cabang

tersebut ditunda sementara atas pernintaan mentri Jajahan. Penundaan ini erat kaitannya dengan adanya peninjauan kembali Oktroi De Javache Bank serta telah hampir berakhirnya tahun anggaran, disamping pertimbangan telah didirikannya kantor cabang De Nederlandsche Handelsbank (sekarang Bank Dagang Negara) pada tahun 1903.

Dalam rapat direksi De Javasche bank tanggal 29 Oktober 1906 atau tiga tahun kemudian, tercatat diterimanya sepucuk surat dari Gubernur Jendral No. 52 tanggal 24 Oktober tahun 1906 mengenai penyerahan sebidang tanah seluas 10460 m^2 yang terletak di desa kejaksangirang kepada De Javasche Bank. Tanah tersebut diserahkan tanpa adanya penggantian biaya namun dengan satu syarat bahwa tanah tersebut hanya diperuntukkan bagi pembangunan gedung kantor. *"Residentie Preanger-Regentschappen, Bestuursafdeeling en hoofdplaats Bandoeng, distric Oedjoengbroengkoelon, dessa Kedjaksangirang",* demikian informasi mengenai sebidang tanah yang disebutkan didalam sertifikat hak milik No. 103 tanggal 8 Maret 1907 berikut surat No. 53 tanggal 13 Februari 1907, dengan nomor kadaster 1022.

Presiden De Javasche Bank ke-11, Mr. G. Vissering (1906-1912), kemudian melanjutkan lebih jauh rencana pendirian kantor cabang Bandung. Tidak lama setelah diterimanya surat keputusan Gubernur Jendral mengenai persetujuan pendirian kantor cabang di Bandung dan Palembang, melalui suratnya no. 44 tanggal 9 Desember 1908, maka pendirian gedung kantor mulai disiapkan. Tepat tanggal 30 Juni 1909, De

Javasche Bank kantor cabang Bandung, resmi dibuka walau masih menggunakan gedung sementara. A.M. Meertens, yang sebelumnya dikenal sebagai pemegang buku/pimpinan pengganti Kantor Cabang Semarang merangkap Pimpinan Cabang Pengganti Kantor Cabang Yogyakarta dan Solo, ditetapkan sebagai pimpinan cabang sementara untuk kantor cabang di Bandung. Dengan didirikannya kantor cabang Bandung ini, maka De Javasche Bank telah memiliki 15 kantor cabang, belum termasuk kantor cabang Palembang di wilayah kolonialisasi Hindia Belanda.

Pada masa presiden De Javasche Bank dipegang oleh E.A. Zeilinga Azn. (1912-1921) yang tercatat sebagai presiden De Javasche Bank ke-12, tepatnya pada tahun 1915, gedung kantor cabang Bandung mulai dibangun secara permanen. Pembangunan gedung diawali dengan pembangunan ruang khazanah. Kendala yang ada saat itu adalah sulitnya pengadaan bahan-bahan meterial yang harus didatangkan dari Eropa. Dalam waktu yang hampir bersamaan juga dilakukan pembangunan gedung dan/atau renovasi gedung-gedung kantor di Batavia (1912), Makassar (1912), Medan (1912), Solo (1915), Yogyakarta (1915), Malang (1915), Kotaraja (1916), Manado (1916), dan Cerebon di tahun 1918, yang kemungkinan menyebabkan gedung-gedung tersebut memiliki kemiripan dalam hal arsitekturnya. Dengan memakan waktu lebih kurang selama tiga tahun, pembangunan gedung permanen Kantor Cabang Bandung dinyatakan selesai dan mulai digunakan pada tanggal 5 Mei 1918.

Pada tahun-tahun menjelang pecahnya perang dunia I, Presiden De Javasche Bank ke-14, Mr. G. G. Van Buttingha Wichers, telah merencanakan adanya pembangunan khazanah besar/perang sekaligus renovasi atas rumah dinas pimpinan cabang. Pembangunan yang secara keseluruhan menelan biaya sebesar 311.805 Gulden tersebut,dilaksanakan oleh biro arsitek dan insinyur Fermont-Cuypers berdasarkan kontrak pada tanggal 26 Agustus 1937 dan direncanakan akan selesai pada tanggal 5 Mei 1938. Peresmian penggunaan khazanah perang ini dilakukan pada tanggal 19 maret 1939 oleh putera buttingha yang berusia 7 tahun yaitu Gerrard Gilles Van Buttingha wichers. Hingga kini prasasti peresmiannya masih menempel kuat pada dinding khazanah setelah lebih dari 56 tahun berlalu.

Perang dunia II pecah, Jepang mulai menyerbu kawasan Asia Tenggara dan Selatan, yang diikuti oleh takluknya Hindia Belanda pada awal tahun 1942. Menjelang ditaklukkannya Hindia Belanda, dengan persetujuan pemerintah, sebagian persediaan emas De Javasche Bank telah berhasil diselamatkan ke wilayah Afrika Selatan dan Australia. Pada tanggal 28 Februari 1942, pemerintah Hindia Belanda-pun telah meminta kepada para direksi bank-bank untuk memindahkan kantor pusat mereka ke kota Bandung.

Pada tanggal 9 Maret 1942 dilakukan penyerahan kedaulatan pemerintah Hindia Belanda kepada Jepang, yang diikuti penyerahan tanpa syarat terhadap seluruh kekayaan yang ada. Penyerahan ini diikuti dengan

maklumat mengenai penangguhan pembayaran utang-utang bank yang berlangsung hingga 20 Oktober 1942, pada saat mana pimpinan Jepang melikuidasi semua bank milik Belanda, Inggris dan beberapa bank milik Cina. Ketentuan likuidasi ini juga ternyata diberlakukan di wilayah luar Jawa, seperti Semenanjung Malaya, Kalimantan, Timur Besar, dan sebagainya dengan wewenang penuh pada masing-masing komandan militer yang membawahinya.

Bank-bank Jepang yang pernah ada sebelum pecah perang, termasuk bank-bank Jepang yang pernah ditutup oleh pemerintah Belanda pada saat dimulainya perang, seperti Yokohama Specie Bank dan Matsui Bank, mulai mengambil alih fungsi dan tugas sektor perbankan. Sebagai bank sirkulasi, ditunjuk Nanpo Kaihatsu Ginko, sebuah bank yang baru didirikan pada masa pendudukan Jepang. Dalam prekteknya Nanpo Kaihatsu Ginko sulit untuk dikatakan sebagai bank sirkulasi, karena fungsi yang dijalankan hanya fungsi koordinasi. Untuk Pulau Jawa, fungsi sirkulasi dilakukan sepenuhnya oleh Yokohama Specie Bank, sedangkan Taiwan Bank memegang fungsi bank sirkulasi untuk luar Pulau Jawa.

Menyerahnya Jepang pada Sekutu pada tahun 1945, telah diikuti oleh Belanda untuk menguasai kembali Hindia Belanda. Dalam bulan Oktober 1945 tentara belanda, dengan membonceng tentara Sekutu, mulai berupaya untuk memegang kembali kontrol kekuasaan di Indonesia. Sebagai langkah pertama dilakukan pemberhentian likuidasi dan segera melakukan pengawasan terhadap Bank-bank Jepang. De Javasche Bank

diminta untuk mengawasi Nanpo Kaihatsu Ginko sekaligus melakukan penutupan terhadap neraca bank Jepang ini. Dimulai dari wilayah-wilayah yang telah dikuasai tentara Belanda, kantor-kantor De Javasche Bank mulai dibuka dan beroprasi kembali.

Pembukaan kembali kantor cabang Bandung dapat dilihat dalam risalah rapat Direksi tanggal 9 Mei 1946 yang menyatakan telah dibuka kembalinya kantor De Javasche Bank Cabang Bandung. Dengan surat edaran No. 119/1-Deversen tanggal 22 Mei 1946 diinformasikan telah dibukanya kembali 10 kantor cabang De Javasche Bank yaitu Batavia, Amsterdam, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Pontianak, Banjarmasin, Makasar dan Manado, sedangkan delapan kantor cabang lainnya yaitu Malang, Kediri, Solo, Yogyakarta, Cirebon, Palembang, Padang dan Kotaraja, karena masih berada di wilayah yang dikuasai oleh Republik Indonesia, untuk sementara belum dapat dioperasikan kembali.

Salah satu yang disepakati dari Konfrensi Meja Bundar (KMB) adalah masih berperannya De Javasche Bank sebagai Bank Sentral. Hal ini disebabkan pemerintah Belanda ingin menjaga kepentingan pembayaran hutang pemerintah Indonesia yang pada saat itu mencapai 4.418,5 juta Gulden. Dalam perkembangan selanjutnya kondisi ini nampaknya kurang dikehendaki oleh banyak kalangan. Banyak tudingan yang kemudian muncul yang menganggap kondisi demikian mencerminkan delum adanya kedaulatan penuh terhadap perekonomian nasional. Sementara itu keberadaan Bank Negara Indonesia yang semula diharapkan dapat

menggantikan peran De Javasche Bank sebagai Bank Sentral, sulit untuk diwujudkan. Di sisi lain, kemampuan De Javasche Bank untuk berperan sebagai Bank Sentral masih dapat diandalkan dengan dukungan pengalaman dan personol yang memadai.

Dalam konsisi seperti disebut diatas, maka muncullah gagasan untuk menasionalisasikan De Javasche Bank, sebagai alternatif terbaik untuk memenuhi harapan banyak pihak sekaligus untuk melindungi kepentingan nasional. Pada bulan Mei 1951 kehendak untuk menasionalisasikan De Javasche Bank disampaikan secara resmi oleh pemerintah kepada parlemen, yang langsunng diikuti pengunduran diri presiden De Javasche Bank ketika itu, Dr. Houwink. Dua bulan kemudian, pemerintah mengirimkan dua utusannya ke negeri Belanda untuk melaksanakan pembelian saham De Javasche Bank.

Sementara itu, di dalam negeri, rencana nasionalisasi De Javasche Bank diikuti dengan pembentukan panitia nasionalisasi De Javasche Bank serta diumumkannya Undang-undang No. 24 tahun 1951 mengenai nasionalisasi De Javasche Bank. Sedangkan rancangan Undang-undang secara organik bagi Bank Sentral disampaikan kepada Parlemen pada September 1952 dan disetujui oleh Parlemen pada tahun 1953. Setelah disahkan oleh presiden pada Mei 1953, Undang-undang pokok Bank Indonesia mulai efektif sejak tanggal 3 Juli 1953.

Undang-undang organik bagi Bank Sentral di Indonesia selanjutnya dikenal sebagai Undang-undang No. 11 tahun 1953 atau

Undang-undang pokok Bank Indonesia merupakan pengganti dari De Javasche Bankwet 1922 atau Undang-undang tanggal 31 Maret 1922 yang merupakan dasar hukum keberadaan De Javasche Bank. Pasal 1 Undang-undang No. 11 tahun 1953 tersebut menyatakan bahwa Bank Sentral Indonesia bernama Bank Indonesia, halaman sesuai dengan penjelasan pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945.

1 Juli 1953 adalah tanggal dimulainya era Bank Indonesia, setelah melalui proses negosiasi yang begitu intens sejak tahun 1951. Masa lima tahun setelah nasionalisasi ini merupakan masa dimana personil-personil eks De Javasche Bank, khususnya orang-orang Belanda, masih dipergunakan secara penuh untuk menjalankan fungsi Bank Indonesia. Fungsi Bank Indonesia itu sendiri adalah meneruskan fungsi De Javasche Bank yang selama ini berjalan, dimana fungsi terpenting yang disepakati pada Konferensi Meja Bundar adalah sebagai Bank Sentral. Keputusan menasionalisasikan De Javasche Bank ini, tidak saja memilliki tujuan-tujuan yang bersifat politis-nasionalistis, namun juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan sebuah Bank Sentral yang dapat memeutuskan kebijakan-kebijakan moneter yang positif. Seperti diketahui bersama, bahwa mengharapkan De Javasche Bank memberikan kebijakan moneter yang tepat bagi negara Indonesia, adalah sesuatu yang begitu sulit, sebab berbagai kebijakan yang diambil De Javasche Bank selain memiliki muatan-muatan politis pemerintah kerajaan Belanda, juga secara teknis

sangat dipengaruhi oleh dinamika pasar uang Eropa, khususnya di negeri Belanda.

Pada masa periode ini, persoalan yang mendapatkan perhatian besar adalah personalia Bank Indonesia, dimana sebagian besar staf dan pejabat masih dijabat oleh keturunan Belanda dan Cina. Untuk itu, diadakan berbagai pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pegawai, khususnya keturunan bumiputra, tampaknya menjadi sesuatu hal yang begitu dikedepankan.

Dari program ini J.A. Sereh yang merupakan salah satu peserta dari gelombang pertama yang mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan kelak akan dipercaya untuk memegang kepemimpinan di kantor cabang Bandung. Struktur organisasi Bnk Indonesia sendiri per 1 Juli 1953 memperlihatkan adanya 12 satuan kerja yaitu Pembukuan, Kas, Administrasi, Urusan Efek, Pemberian Kredit Jakarta, Sekretariat & Personlia, Urusan Wesel, Pemberian Kredit Pusat, Dana Devisien, Statistik Ekonomi, Urusan Umum dan Bagian Luar Negeri.

Untuk kantor Bank Indonesia Cabang Bandung, pada masa tahun 1953 sampai tahun 1957, sejauh ini masih belum diperoleh informasi yang cukup jelas mengenai sistem organisasinya. Namun demikian dengan melihat dari struktur organisasi kantor pusat, maka di Kantor Cabang Bandung dapat diduga memiliki format dan jumlah satuan kerja yang tidak jauh berbeda.

Sementara itu, seperti telah disinggung diatas, dalam periode tersebut sebgian besar personalia Bank Indonesia, terutama pejabat dan pimpinan, masih dipegang oleh keturunan Belanda dan Cina. Dalam kondisi demikian, ditambah dengan tidak terdapatnya informasi dalam laporan tahunan Bank Indonesia tahun 1953-1957, maka dapat diduga bahwa Pimpinan Cabang Bank Indonesia Bandung pada awal-awal lahirnya Bank Indonesia adalah mantan Pimpinan De Javasche Bank Bandung yaitu H.C. Hordijk, yang tidak diketahui hingga tahun berapakah masa kepemimpinannya. Sementara itu, berdasarkan dokumentasi surat No. 5/83-Pegawai tnggal 16 Januari 1958, diketahui bahwa Pimpinan Cabang Bank Indonesia Bandung hingga tahun 1957 adalah P. Bordes, walaupun sangat disayangkan tidak dijelaskannya sejak tahun berapa orang ini mulai memangku jabatannya. Selain itu, dari dokumen tersebut dapat diketahui bahwa jumlah personil Bank Indonesia Bandung, setidaknya pada awal januari tahun 1958 berjumlah 70 orang.

Pada kurun waktu 1958-1966 merupakan masa yang penting, dimana fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral mulai semakin ditingkatkan seiring mulai dilepaskan aktifitas komersialnya. Awal periode ini juga ditandai dengan dimulainya tampuk kendali pimpinan Bank Indonesia dipegang sepenuhnya oleh orang Indonesia asli. Walu kondisi ini muncul lebih disebabkan karena adanya konfrointasi soal Irian Barat atau sekarang yang lebih dikenal sebagai Papua, namun momen ini mau tidak mau merupakan saat berharga dan penting, tatkala bangsa Indonesia,

khususnya personil Bank Indonesia, dipaksa untuk mampu menjalankan roda organisasi dan fungsi bank sentral indonesia ini.

Periode ini merupakan awal dari berkembangnya organisasi dan manajemen Bank Indonesia ke arah yang lebih kompleks. Pada masa itu pula fungsi Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, mulai dicoba untuk dijalankan, setelah periode sebelumnya cenderung hanya menjalankan fungsi sebagai bank sirkulasi dan fungsi bank komersial. Pada tahun 1960, dilakukan pengorganisasian kembali dengan ditetapkannya urusan-urusan dibawah Gubernur Bank Indonesia yang dipimpin oleh pejabat setingkat Direktur. Pengorganisasian ini merupakan langkah yang dipandang tepat karena tugas dan tanggung-jawab Bank Indonesia menjadi terlihat lebih jelas sesuai dengan fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral. Urusan-urusan tersebut adalah Moneter, Pembangunan Ekonomi, Research dan Statistik, Luar Negeri dan Umum, dimana jumlah satuan kerja yang semula hanya berjumlah 12 kemudian berubah menjadi 21 bagian.

Memasuki dasawarsa tahun 60-an, perubahan-perubahan terus terjadi seiring dengan kondisi yang menyertainya. Iklim politik pada waktu itu sangat berpengaruh besar terhadap berbagai roda kehidupan, terlegih lagi kepada lembaga-lembaga pemerintah. Muatan politis tersebut mulai dirasakan ketika konsepsi "*Terpimpin"* mulai dikibarkan dalam peta politik nasional. Arah ini menjadi jelas tatkala kedudukan Gubernur Bank Indonesia mulai diberi warna politis pada tahun 1963, yang dimana kedudukannya dimasukkan kedalam susunan kabinet sebagai Menteri

Urusan Bank Sentral. Selanjutnya langkah ini diteruskan dengan diperkenalkannya konsep bank berjuang sebagai salah satu alat revolusi, yang kemudian diikuti gagasan adanya Bank Tunggal. Adanya rencana bank tunggal membawa konsekwensi sendiri, khususnya penyesuaian dalam organisasi Bank Indonesia, dimana terlihat dari adanya perubahan-perubahan pada struktur organisasi Bank Indonesia secara bertahap hingga akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1965 secara sah diresmikanlah konsep Bank Tunggal ini, dan Bank Indonesia berubah menjadi Bank Negara Indonesia Unit I.

Adanya kemelut politik yang berakhir dengan perubahan politik secara mendasar dan kemudian memunculkan yang disebut sebagai Orde Baru, telah memberikan peluang untuk mengkaji ulang berbagai gagasan politis semasa Orde Lama, termasuk diantaranya adalah kebijakan mengenai Bank Tunggal. Dengan berbagai pertimbangan serta kondisi pda masa itu, nka pada bulan Desember 1968 disahkan 7 rencana Undang-undang menjadi Undang-undang yang efektif sejak akhir tahun itu juga. Dengan Undang-undang ini, yang disahkan melalui keputusan mentri keuangan No. KEP. 600/M/IV/12/1968 tanggal 18 Desember 1968, maka semua bank pemerintah yang sebelumnya terintegrasikan kedalam wadah bank tunggal, kembali menjadi bank pemerintah yang berdiri sendiri-sendiri berdasarkan undang-undangnya masing-masing.

Informasi mengenai Bank Indonesia Kantor Cabang Bandung sendiri dalam periode tersebut hampir dapat dikatakan sangat minim.

Walaupun terdapat data, baik mengenai pimpinan cabang maupun beberapa foto dokumenter, khususnya sekitar tahun 1965-an, namun hal itu tidak cukup membantu untuk mengungkapkan keberadaan kantor cabang Bandung dalam periode tersebut. Dalam periode 9 tahun (awal 1958-1966) tersebut, tercatat terdapat 6 kali pergantian kepemimpinan bi Bank Indonesia kantor cabang Bandung.

J.A. Sereh merupakan putera Indonesia pertama yang memangku jabatan Pimpinan Cabang di kantor cabang Bandung ini. Tatkala De Javasche Bank dinasionalisasi, J.A. Sereh, yang merupakan angkatan pertama di lingkungan Bank Indonesia yang mendapatkan pendidikan perbankan di luar negeri, telah menjabat sebagai kuasa kas di kantor cabang Bandung. J.A. Sereh dipercaya untuk memimpin Bank Indonesia Bandung sejak awal tahun 1958-1960, yang kemudian dilanjutkan oleh M. Rifai (Maret 1960-November 1960). Selanjutnya berturut-turut Bank Indonesia Bandung dipimpin oleh R. Sujanto (1960-1962), R.S. Natalegawa (1962-1963), R. Dhomadi Singawigoena (1963-1964), H.P. Toar (1964-1965), dan R. Soejoto (1965-1968). Dari foto dokumentasi yang ada, jumlah karyawan Bank Indonesia Bandung dalam masa kepemimpinan R. Soejoto lebih kurang 90 orang.

Tahun 1966 hingga sekarang adalah masa yang paling penting bagi Bank Indonesia. Tidak saja karena fungsi dan peran Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang terus semakkin menguat, terlebih lagi setelah Undang-undang no. 13 tahun 1968 disahkan oleh Presiden Republik

Indonesia, namun juga karena adanya peran lain Bank Indonesia Seperti yang dinyatakan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 13 tahun 1968. Awal tahun 1966 sendiri bagi Bank Indonesia merupakan awal dari suatu tugas berat, tidak saja karena kondisi perekonomian nasional ketika itu tengah dilanda *hyper inflasion*, namun juga karena adanya kemelut politik yang belum tuntas sepenuhnya. Pengganti Gubernur Bank Negara Indonesia Unit 1 (Bank Indonesia) pada maret 1966 dari T. Jufuf Muda dalam kepada Radius Prawiro merupakan langkah awal yang mengarah kepada upaya pengendalian laju inflasi nasional. Lebih jauh pemerintah orde baru juga mempertimbangkan adanya perubahan atas keberadaan Bank Tunggal yang dinilai kurang sejalan dengan upaya-upaya pengamanan keuangan negara dan upaya penyehatan tata perbankan nasional. Untuk itulah, pada langkah selanjutnya pemerintah melanjutkan 8 buah rancangan undang-undang masing-masing mengenai pokok-pokok perbankan, mengenai bank sentral dan 6 rancangan undang-undang mengenai pendirian bank-bank pemerintah.

Peda akhir tahun 1968 disahkanlah Undang-undang No. 13 mengenai bank sentral dimana hal ini memiliki arti penting bagi Bank Indonesia yang selama setahun terakhir telah ditunjuk kembali untuk berfungsi sebagai Bank sentral. Dengan efektifnya Undang-undang No. 13 tahun1968 ini berarti berakhir pulalah aktifitas komersial Bank Indonesia yang selama itu masih diizinkan dalam Undang-undang No. 11 tahun 1953, kecuali untuk kantor cabang di Irian Jaya. Namun demikian,

berakhirnya fungsi komersial Bank Indonesia tersebut selanjutnya diganti oleh fungsinya yang lain yaitu Bank Indonesia sebagai agen pembangun. Dengan fungsi ini maka Bank Indonesia memiliki tugas untuk mendorong kelancaran produksi, memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat (pasal 7 ayat 2 Udang-undang no. 13 tahun 1968).

Dalam kaitannya dengan pengendalian tingkat inflasi, penetapan tingkat suku bunga yang tinggi disamping itu menjadi pendorong gerakan menabung dalam skala luas, merupakan langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi jumlah uang beredar dimasyarakat, yang pada gilirannya memang terbukti mampu menekan inflasi nasional. Langkah berikutnya yang dikedepankan pemerintah orde baru adalah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yaitu pemenuhan kebutuhan pangan. Untuk itu program swasembada, yang disebut oleh sebagian kalangan barat sebagai revolusi hijau, dan kredit untuk membantu pengusaha kecil, menjadi perhatian utama yang terus didorong oleh pemerintah. Tercatat beberapa skim kredit dimunculkan pada awal dasawarsa tahun 70-an oleh pemerintahan melalui KLBI (Kredit Likuiditas Bank Indonesia).

Di Jawa Barat sendiri perkembangan pemberiaan KLBI, khususnya Kredit Infesrtasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), dapat dilihat dari kurun waktu antara tahun 1979-1989. Posisi pemberian KIK dalam rentang waktu sepuluh tahun tersebut rata-rata berkisar antara Rp 50 M – 60 M, dengan posisi terendah pada tahun 1979 sebesar Rp. 22 M dan posisi tertinggi pada tahun 1989 yaitu sebesar Rp. 84 M, sedangkan

posisi KMKP dalam sepuluh tahun tersebut rata-rata berada posisi Rp. 166 Milyar. Posisi terendah pada tahun 1979 yaitu sebesar Rp. 33 M dan pada tahun 1989 telah mencapai Rp. 251 milyar.

Memasuki tahun 1980-an ditandai dengan jatuhnya harga minyak dunia. Hal ini memaksa pemerintah untuk menyadari bahwa dana pembangunan tak dapat lagi begitu bergantung kepada pemerintah. Sumber dana masyarakat menjadi alternatif paling potensial dalam menghimpun dana untuk pembangunan. Untuk itu pada Juni 1983 diluncurkanlah kebijakan keuangan, yang telah memudahkan pendirian bank dan kantor cabangnya. Kebijakan ini selanjutnya lebih disempurnakan lagi melalui berbagai paket kebijakan lanjutan yang dimunculkan kemudian. Bagaikan jamur dimusim hujan, pendirian bank umum, pembukaan kantor bank dan bank perkreditan rakyat, tercatat meningkat dengan tajam. Persaingan menjadi tak terhindarkan, yang mana disuatu sisi diharapkan situasi ini akan membawa pengaruh positif yaitu adanya peningkatan kualitas pelayanan perbankan.

Seperti halnya di wilayah lain, perkembangan perbankan di Jawa Barat juga menunjukkan peningkatan yang cukup tajam. Posisi penghimpunan dana perbankan dalam kurun waktu 5 tahun sejak tahun 1983 sampai tahun 1988 yaitu meningkat lebih dari 400%, dari angka Rp. 544 milyar menjadi Rp. 2.274 milyar. Peningkatan ini juga diikuti oleh peningkatan pemberian kredit di Jawa Barat yang mencapai hampir 250%

dalam waktu 5 tahun yaitu dari Rp. 1.449 milyar menjadi Rp. 3.533 milyar.

Walaupun dampak kebijakan pakjun ’83 tersebut telah dirasakan cukup berhasil, namun nampaknya terdapat beberapa kendala yang masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut untuk perkembangan dunia perbankan. Untuk itu, pada Oktober 1988 dikeluarkan berbagai macam kebijakan yang pada dasarnya merupakan upaya lebih jauh untuk mendorong perkembangan sektor perbankan dalam rangka lebih menggiatkan pengerahan dana masyarakat. Di Jawa Barat tercatat jumlah bank umum telah meningkat sebesar 319% dalam waktu 7 tahun yaitu sejak akhir 1988 hingga akhir 1995 yaitu dari 21 bank menjadi 88 bank, sedangkan jumlah kantornya bertambah lebih dari 6 kali lipat yaitu dari 188 kantor menjadi 1.398 kantor, dalam periode yang sama. Penghimpunan dana masyarakat juga mengalami peningkatan yaitu sebesar lebih dari 550% yaitu dari Rp. 2,4 triliun menjadi Rp. 16,5 triliun, sedangkan kredit meningkat sebesar 240% yaitu dari Rp. 5,2 triliun menjadi Rp. 20,4 triliun dalam kurun waktu 7 tahun yaitu sejak akhir tahun 1989 hingga Oktober 1995.

Memasuki tahun 1990-an perkembangan pesat dan berbagai inovasi masih terus diperharikan dunia perbankan, yang mana telah memacu bank Indonesia untuk terus menyempurnakan berbagai ketentuan yang terkait. Dalam kaitan itu, untuk mengantisipasi perkembangan perbankan yang terus meningkat, maka pemerintah memandang perlu

untuk menyempurnakan berbagai macam ketentuan mengenai perbankan nasional. Untuk itu pada tahu 1992 dikeluarkanlah Undang-undang no. 7 yang mengatur kegiatan perbankan nasional. Salah satu dari hal yang diatur adalah adanya penyederhanaan jenis bank dari semula empat jenis yaitu bank umum, bank tabungan, bank pembangunan dan bank sekunder, menjadi hanya dua jenis bank yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat.

Perkembangan perbankan yang demikian pesat, khususnya pemberian kredit, telah menyebabkan banyak kalangan khawatir akan berdampak terhadap perekonomian nasional. Hal ini dibuktikan dengan adanya “Gebrakan Sumarlin” yang merupakan salah satu indikator betapa expansi kredit perbankan saat itu telah mengkhawatirkan beberapa pihak petinggi ekonomi nasional. Selanjutnya, dengan munculnya kasus-kasus kredit macet yang cukup besar dan mendapat perhatian publik secara luas, disamping adanya komitmen perdagangan bebas dunia pada awal abad ke-21 mendatang, telah mendorong Bank Indonesia untuk menyempurnakan berbagai ketentuannya. Disamping itu, Bank Indonesia telah meminta dunia perbankan untuk terus meningkatkan pelaksanaan prinsip kehati-hatian disamping meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kualitas perbankan nasional.

Dalam periode yang cukup panjang tersebut, Bank Indonesia Bandung telah mengalami pergantian pemimpin cabang sebanyak 11 kali. Pada sekitar tahun 1978, telah dilakukanpenambahan bangunan yang

menyatukan bangunan kantor utama dengan bangunan rumah dinas pemimpin cabang. Penambahan bangunan ini meliputi kurang lebih 800 meter persegi dan dikerjakan dalam jangka waktu kurang lebih 9 bualan.

Sejalan dengan kehendak pemerintah yang terus memberikan perhatiannya kepada pengusaha kecil, maka sejak sebelum tahun 1980, Bank Indonesia telah merintis berbagai macam alternatif proyek didalam membantu usaha kecil. Di Kantor Cabang Bandung, upaya mendorong usaha kecil dimulai secara efektif pada awal tahun 80-an, dengan dibukanya seksi PUK (Pembangunan Usaha Kecil). Pembentukan seksi ini, disamping untuk memperlihatkan keperdulian Bank Indonesia terhadap usaha kecil, juga dimaksudkan agar kepedulian tersebut dapat diupayakan lebih efektif dan efisien.

Dengan terus berkembangnya sektor perbankan di Jawa Barat, khususnya setelah diluncurkannya paket kebijakan pada tahun 1983, maka menjadi dipandang perlu adanya koordinasi di Jawa Barat untuk mengantisipasi perkembangan yang terus meningkat. Untuk itu, sejak tanggal 19 Maret 1986, Bank Indonesia Kantor Cabang Bandung ditetepkan sebagai koordinator kantor-kantor cabang Bank Indonesia di wilayah Jawa Barat. Sejalan dengan fungsinya sebagai koordinator wilayah, status Bank Indonesia Kantor Cabang Bandung ditingkatkan dari kelas II menjadi kelas I.

Adanya peningkatan kelas tersebut telah mengakibatkan adanya perubahan struktur organisasi kantor cabang Bandung. Berdasarkan Surat

Edaran No. 18/65/INTERN tahun 1985 mengenai penyempurnaan Kantor Cabang Bank Indonesia Bandung/Koordinator Wilayah Bank Indonesia Jawa Barat, diketahui bahwa Pimpinan Cabang Bank Indonesia Bandung dibantu oleh seorang wakil pimpinan cabang dan tiga wakil pimpinan cabang bidang, yang masing-masing membawahi empat seksi. Bidang I mmembawahi Seksi Pengawasan & Pembinaan Bank, Seksi Ekonomi & Statistik, Seksi Kliring, Pasar Uang & Modal Luar Negeri, serta Seksi Umum. Bidang II membawahi Seksi Pembangunan Biadang Usaha Kecil, Seksi Kredit Investasi Kecil & Kredit Modal Kerja Permanen, Seksi Non Kredit Investasi Kecil & Kredit Modal Kerja Permanen serta Seksi Pembinaan Kredit, sedangkan Bidang III membawahi Seksi Kas & Pengedaran, Seksi Pembukuan & Anggaran, Seksi Sekretariat dan Seksi Materiil.

Pada bulan juni 1991, dilakukan reorganisasi kantor cabang, dimana pimpinan cabang dibantu oleh seorang wakil pimpinan cabang dan empat orang kepala bidang. Bidang I membawahi Seksi Pengawasan & Pembinaan Bank I, Seksi Pengawasan & Pembinaan Bank II dan Tim Pemeriksa. Bidang II mengawasi Seksi Pembangunan Usaha Kecil, Seksi Kredit & Luar Negeri serta Seksi Ekonomi Statistik dan Komputer. Bidang III mengawasi Seksi Kas, Seksi Pengedaran, Seksi Kliring & Pasar Uang dan Modal serta Seksi Akunting & Anggaran, sedangkan Bidang IV menbawahi Seksi Sumber Daya Manusia, Seksi Logistik dan Seksi

Sekretariat. Perubahan struktur organisasi ini juga diikuti oleh perubahan penyebutan wakil pimpinan cabang bidang menjadi kepala bidang.

Sementara itu, dalam rangka mengantisipasi aktivitas sektor perbankan dan jumlah pegawai yang kian meningkat, keadaan gedung kantor lama dipandang sudah tidak dapat memenuhi kubutuhan lagi. Untuk itu, maka pada tahun 1996, dilaksanakan pembangunan gedung baru. Gedung baru tersebut terletak di atas tanah seluas kurang lebih 1.500M^2, terdiri dari 6 lantai dengan luas mencapai kurang lebih 10.000M^2. pembangunan gedung tersebut membutuhkan waktu penyelesaian kurang lebih 2,5 tahun.

1.2 Visi dan Misi Bank Indonesia Bandung

Pada suatu instansi baik swasta maupun pemerintahan pastinya memiliki suatu visi dan misi yang akan mengarahkan suatu instansi tersebut agar tidak keluar dari jalur yang seharusnya. Berikut visi dan misi dari Bank Indonesia Bandung

1.2.1 Visi Bank Indonesia Bandung

Menjadi kantor Bank Indonesia yang dapat dipercaya di daerah bandung melalui peningkatan peran dalam menjalankan tugas-tugas yang telah diberikan oleh Bank Indonesia Pusat.

1.2.2 Misi Bank Indonesia Bandung

1. Mendukung pencapaian kebijakan Bank Indonesia di bidang moneter.
2. Mendukung pencapaian kebijakan Bank Indonesia di bidang perbankan.
3. Menciptakan sistem pembayaran secara efisien dan optimal.
4. Memberikan saran kepada pemda dan lembaga terkait lainnya di daerah dalam rangka mendukung perkembangan ekonomi di daerah bandung.

1.3 Logo dan Arti Logo Perusahaan

1.3.1 Logo Perusahaan

Bank Indonesia Bandung adalah sebuah bank pemerintah yang independen dan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan melainkan bertujuan untuk menjaga stabilitas moneter di Indonesia. Maka dari itu Bank Indonesia memiliki lambang atau logo perusahaan yang menjadi identitas jati diri perusahaannya.

Adapun logo dari Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1

Logo Bank Indonesia



Sumber : Arsip Dokumen Bank Indonesia, 2011

1.3.2 Arti Logo Perusahaan

Seperti halnya sebuah nama, logo perusahaan pun memiliki arti atau makna tersendiri. Adapun arti dari logo pada perusahaan Bank Indonesia tersebut adalah :

1. Gambar lingkaran.

   Lingkaran merupakan perwujudan dari negara indonesia.

2. Singkatan bertuliskan BI di tengah lingkaran.

   Dalam hal ini gambar tersebut memiliki arti bahwa Bank Indonesia merupakan bank central dari semua bank yang ada di indonesia.

3. Warna dominan biru

   Warna dominan biru ini merupakan cerminan dari langit yang indah dan berwarna biru yang terang yang berarti Bank Indonesia ingin menjadi secerah langit biru yang indah dilihat.

1.4 Sejarah Divisi Logistik Bank Indonesia Bandung

Pada dasarnya tidak tertulis secara pasti kapan sebenarnya Divisi Logistik ini dibentuk, tetapi jika dilihat dari sejarah Bank Indonesia Bandung maka, penulis dapat menyimpulkan bahwa Divisi Logistik ini dibentuk kira-kira tahun 1953 pada masa H.C. Hordijk (Pimpinan Cabang Bank Indonesia Bandung Ke-1).

Dari pada awal berdirinya hingga sekarang terdapat 2 tugas pokok dari divisi Logistik adalah meliputi :

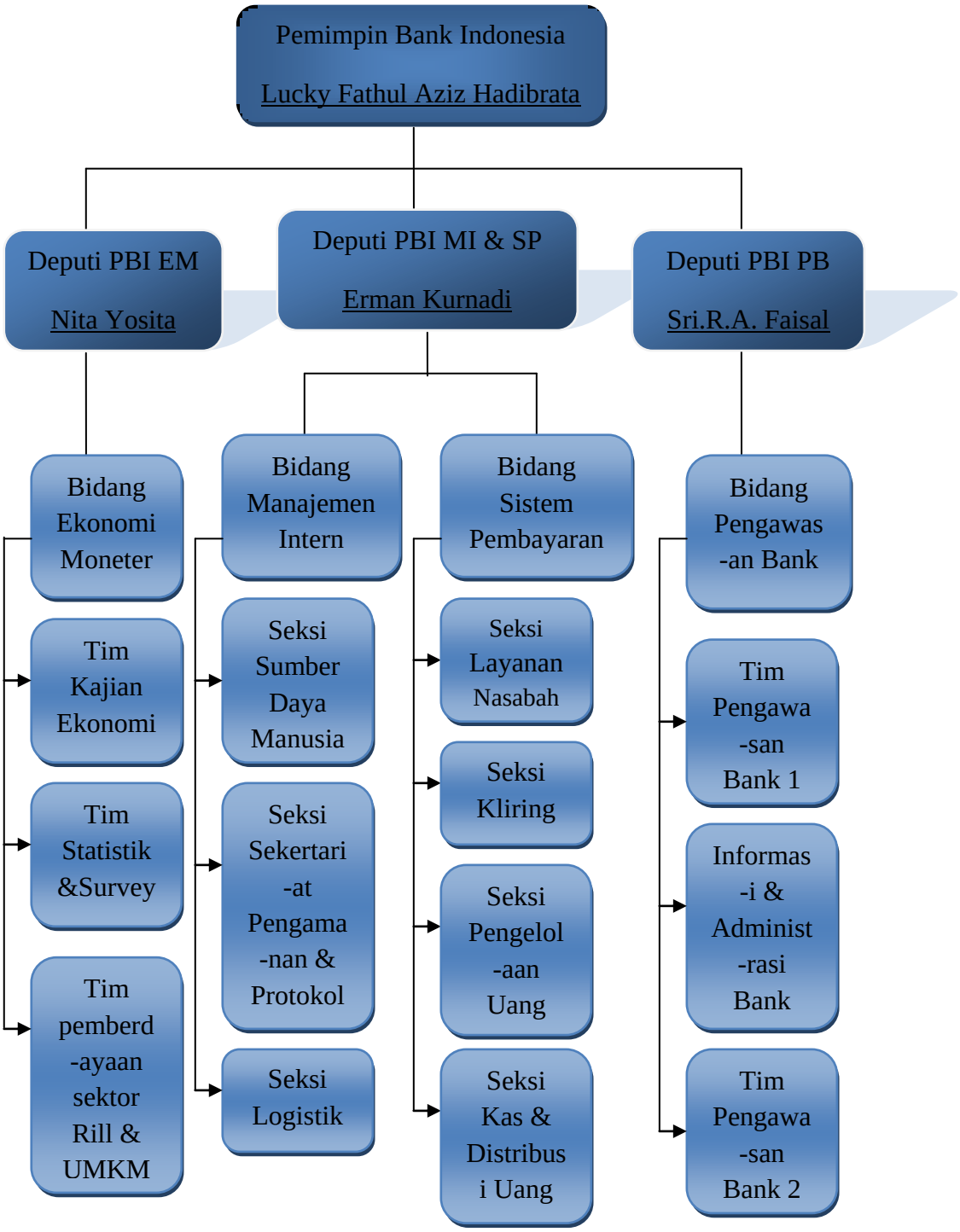
- PERENCANAAN, PENGADAAN DAN PENGAWASAN.
- PEMELIHARAAN,PENATAUSAHAAN,PEMANFAATAN DAN PENGHAPUSAN.

1.5 Struktur Organisasi Perusahaan

Bank Indonesia Bandung memiliki struktur organisasi perusahaan yang terdiri dari beberapa bagian. Adapun struktur dari Bank Indonesia Bandung dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut ini :

Gambar 1.2

Bagan Struktur Organisasi Bank Indonesia Bandung



Sumber : Arsip Dokumen Bank Indonesia, 2011

Pada bagan 1.2 dapat dilihat struktur organisasi Bank Indonesia Bandung dimana dipimpin oleh seorang Pimpinan Bank Indonesia, yang dibantu oleh Deputi Pimpinan Bank Indonesia bidang Ekonomi Moneter, Deputi Pimpinan Bank Indonesia bidang Manajemen Intern dan Sistem Pembayaran, Deputi Pimpinan Bank Indonesia bidang Pengawasan Bank. Pimpinan Bank Indonesia secara langsung membawahi Deputi Pimpinan Bank Indonesia bidang Ekonomi Moneter, Deputi Pimpinan Bank Indonesia bidang Manajemen Intern dan Sistem Pembayaran dan Deputi Pimpinan Bank Indonesia bidang Pengawasan Bank.

Deputi Pimpinan Bank Indonesia bidang Ekonomi Moneter membawahi beberapa divisi yaitu bidang ekonomi moneter, tim kajian ekonomi, tim statistik dan survai dan tim pemberdayaan sektor riil dan UMKM.

Deputi Pimpinan Bank Indonesia bidang Manajemen Intern dan Sistem Pembayaran membawahi beberapa divisi yaitu bidang manajemen intern, divisi sumber daya manusia, sekretariat pengamanan dan protokol, divisi atau seksi logistik, bidang sistem pembayaran, bidang layanan nasabah, kliring, pengelolaan uang dan yang terakhir seksi kas dan distribusi uang.

Sedangkan Deputi Pimpinan Bank Indonesia bidang Pengawasan Bank membawahi beberapa divisi yaitu bidang pengawasan bank, tim pengawasan bank 1, informasi dan administrasi bank dan yang terakhir adalah tim pengawasan bank 2.

1.6 *Job Description*

1.6.1 Kepala Bank Indonesia Bandung

- **Tugas Utama**

1. Mengawasi dan mengatur seluruh pegawai Bank Indonesia.
2. Memantau dan mengefaluasi kinerja pegawai Bank Indonesia.
3. Memberikan perintah secara langsung kepada kepala-kepala divisi.
4. Bertanggung jawab langsung kepada pimpinan Bank Indonesia Pusat.

1.6.2 Deputi Pimpinan Bank Indonesia Bidang Ekonomi Moneter

- **Tugas Utama**

1. Menjaga stabilitas ekonomi moneter.
2. Mengawasi divisi-divisi yang dibawahinya.
3. Mengefaluasi kinerja divisi-divisi yang dibawahinya.
4. Bertanggung jawab kepada pimpinan bank indonesia terhadap kinerja bawahannya.

1.6.3 Deputi Pimpinan Bank Indonesia Bidang Manajemen Intern dan Sistem Pembayaran

- **Tugas Utama**

1. Mengawasi menajemen intern dan sistem pembayaran.
2. Mengawasi divisi-divisi yang dibawahinya.

3. Mengawasi kinerja divisi-divisi yang dibawahinya.
4. Bertanggung jawab secara langsung kepada pimpinan bank indonesia terhadap kinerja bawahannya.

1.6.4 Deputi Pimpinan Bank Indonesia Bidang Pengawasan Bank

- **Tugas Utama**

1. Memberikan pengawasan kepada bank lain.
2. Menberikan izin kelayakan kepada sebuah bank untuk dapat melanjutkan beroprasi atau tidak.
3. Memberi masukan kepada kepala bank indonesia tentang masalah-masalah perbankan.
4. Mengawasi kinerja divisi-divisi yang dibawahinya.
5. Bertanggung jawab secara langsung kepada pimpinan bank indonesia terhadap kinerja bawahannya.

1.6.5 Seksi logistik (Divisi dimana penulis menjalankan PKL)

- **Tugas Utama**

1. Melakukan perencanaan, pengadaan dan pengawasan terhadap aset bank indonesia.
2. Melakukan pemeliharaan, penata usahaan, pemanfaatan dan penghapusan terhadap aset-aset yang dimiliki bank indonesia.

3. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Deputi Pimpinan Bank Indonesia bidang Manajemen Intern dan Sistem Pembayaran.

1.7 Sarana dan Prasarana

Penulis didukung oleh sarana dan prasarana yang dimiliki oleh perusahaan dan juga yang ada di bagian Logistik, dimana penulis menggunakannya untuk menunjang pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan.

Tabel 1.1

Sarana di Bank Indonesia Bandung

No	Sarana	Jumlah	Keterangan
1.	Lapangan Upacara	1	Baik
2.	Ruang Tunggu Tamu	2	Baik
3.	Ruang kazanah	1	Baik
4.	Masjid	1	Baik
5.	Koperasi	1	Baik
6.	Gedung Administrasi	1	Baik
7.	Gedung Serba Guna	1	Baik
8.	Aula	1	Baik
9.	Tempat Parkir	3	Baik
10.	Pos Satpam	4	Baik
11.	Pos Penerimaan Surat	1	Baik
12.	Toilet	15	Baik
13.	Gudang	10	Baik
14.	Smoking Area	5	Baik
15.	Perpustakaan	1	Baik
16.	Ruang Rapat	10	Baik
17.	Kantin	1	Baik
18.	Ruang OB	3	Baik

Sumber: Catatan Penulis, 2011

Tabel 1.2

Prasarana di Seksi Logistik Bank Indonesia Bandung

No.	Inventaris	Jumlah	Keterangan
1.	Lemari besi	5	Baik
2.	Komputer	12	Baik
3.	Laptop	6	Baik
4.	Meja kerja	12	Baik
5.	Kursi kerja	12	Baik
6.	Lemari kaca	4	Baik
7.	Sofa	2	Baik
8.	Meja sofa	1	Baik
9.	AC	5	Baik
10.	Dispenser	2	Baik
11.	TV	2	Baik
12.	Handycam	3	Baik
13.	Kamera	3	Baik
14.	Infokus	2	Baik
15.	Printer	5	Baik
16.	Scanner	2	Baik
17.	White board	2	Baik
18.	Telepon	12	Baik
19.	Lemari es	1	Baik
20.	Excel	1	Baik

Sumber : Catatan Penulis, 2011

1.8 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan

1.8.1 Lokasi Pelaksanaan PKL

Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di bagian logistik Bank Indonesia Bandung

Alamat : Jl. Braga no 108 Bandung 40111, Indonesia.

Telepon : 022 4230223

Website : www.bi.go.id

1.8.2 Waktu Pelaksanaan PKL

Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan terhitung dari tanggal 25 Juli 2011 sampai dengan 18 Agustus 2011. Dengan waktu kerja dari hari Senin sampai dengan hari Jumat mulai pukul 07.00-16.00 WIB.